DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

D.A Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan,* Universitas Parahyangan, Bandung, 1997.

Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Herman Hermit, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Ilhmi Basri, *Sistem Hukum Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Jamulya, *Evaluasi Sumber Daya Lahan,* Alumni, Yogyakarta, 1991.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah,* Nuansa, Bandung, 2008.

Lestari, *Analisis Ekonomi Dan Kelembagaan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian Di Kabupaten Karawang.* Jurusan Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2009.

Lilik Mulyadi*, Teori pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Sebuah Kajian Deskriftif Analitis, 2002.

Luthfi Rayes, *Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan,* Andi, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Iqbal dan Sumaryanto, *Strategi Pengendalian Alih fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat,* Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Nasoetion dalam Muhammad Iqbal dan Sumaryanto, *Strategi Pengendalian Alih fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat.*

Nursid Sumaatmadja, *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan,* Alumni, Bandung, 1980.

Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sudargo Gautama dan Ellyda T. Soetijarto, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sughandy, *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Grasindo, Jakarta, 1998.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Pangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031.

C. Sumber Lain

Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, 2012.

Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan, Departeman Pekerjaan Umum, 2006.

Otje Salman Soemadiningrat, *Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM*, Makalah pada acara Up Grading Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 2010.

D. Website

Alih Fungsi Lahan, http://id.scribd.com.

Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional, http://www.bappenas.go.id.

Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, http://bulletin.penataanruang.net.

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dipengaruhi Oleh Partisipasi Masyarakat, http://dianagustia.blogspot.com.

Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi, http://jabarprov.go.id.

Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, http://balittanah.litbang.deptan.go.id.

Tata Ruang, www. wikipedia. com.

http://www.bps.go.id.

http://www.datastatistik-indonesia.com.

http://www.ensiklopedia.com.

http://www.korantempo.com.